

ANALISIS TENTANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA PAREPARE

*Analysis on the Implementation of Green Open Space Management Policies in
Parepare City*

Haikal Kasenda¹⁾, ikhsan hidayat²⁾

Email : haikalkasenda35@gmail.com, ikhsanh854@gmail.com

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Jln. Perintis Kemerdekaan Km. 10. Kampus Unhas Tamalanrea Makassar 90245.
Sulawesi Selatan, Indonesia

Abstract

In carrying out development, the city government should be more objective in assessing the potential impacts of planned projects. This is crucial as such developments can influence the city's growth and often result in inconsistencies in spatial planning, including green open spaces. In practice, only internal or external factors tend to influence these plans, leading to inefficiencies in managing green open spaces. For instance, internal factors may include transforming a previously non-economical green open space into an economic area without considering its benefits and function as a green space. These issues represent just a small fraction of the challenges in maintaining such spaces. According to the regulations issued by the city government in the form of regional regulations, oversight and legal enforcement are also stipulated for all parties involved in the implementation of green open space management policies in Parepare City. In this regard, the city government must adopt a more objective approach and avoid selectivity in addressing violations of these policies. Based on this rationale, the researcher is intrigued to conduct a study on this topic to analyze the existence and management of green open spaces in greater depth. The study is titled: "Analysis on the Implementation of Green Open Space (GOS) Management Policies in Parepare City."

Keywords : Policy Implementation Analysis, Green Open Space Policy.

Abstrak

Dalam melaksanakan pembangunan hendaknya pemerintah kota lebih obyektif dalam melihat dampak-dampak yang akan terjadi apabila hendak membangun, karena hal-hal tersebut dapat mempengaruhi perkembangan suatu kota, yang biasanya membuat rencana tata ruang, dalam hal ini salah satunya adalah ruang terbuka hijau menjadi tidak konsisten. Dalam pelaksanaannya hanya ada faktor internal atau eksternal yang mempengaruhi sehingga menimbulkan ketidakberdayaan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. Faktor internal, misalnya suatu kawasan ruang terbuka hijau yang sebelumnya tidak mempunyai nilai ekonomi, dikembangkan menjadi kawasan ekonomis tanpa mempertimbangkan manfaat dan fungsinya sebagai ruang terbuka hijau. Hal-hal tersebut hanyalah sebagian kecil dari proses pemeliharannya, karena berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kota dalam bentuk peraturan daerah, juga diatur masalah pengawasan dan penegakan hukum bagi seluruh elemen yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau di wilayah tersebut. kota Parepare. Dari situ, Pemkot harus lebih objektif dalam memandang, dan tidak selektif dalam menindak oknum yang melanggar kebijakan. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait hal tersebut untuk menganalisis lebih dalam keberadaan ruang terbuka hijau dengan judul: "Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Parepare.

Kata Kunci: Analisis Implementasi, Kebijakan Ruang Terbuka Hijau.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara yang terdiri dari banyak pulau besar dan kecil yang terbentang mulai dari barat hingga timur, dari Sabang sampai Merauke. Letak Indonesia yang berada pada garis khatulistiwa membuat Indonesia memiliki posisi yang strategis dari segi bentuk. Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang berbentuk Republik, terdiri dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/ kota² (Wikipedia, 2018). Negara Kesatuan Republik Indonesia juga merupakan Negara dengan jumlah penduduk sangat besar serta peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat pesat. Berdasarkan hal tersebut Indonesia dihadapkan dengan masalah pemanfaatan ruang wilayah demi menjamin ruang gerak yang luas dan kehidupan yang layak bagi masyarakatnya. Lingkungan masyarakat yang berupa kawasan/ permukiman merupakan ruang lingkup kehidupan sosial dimana masyarakat memusatkan dan melakukan segala aktivitas mulai dari kegiatan ekonomi, politik, sosial hingga kebudayaan. Kota Parepare adalah Salah satu dari 3 Kota Madya yang terletak di Sulawesi Selatan, Berjarak 152 Km Dari Kota Makassar yang menjadi gerbang ketika ingin ke daerah Pinrang atau Sidrap. Secara Administrasi Kota Parepare merupakan kota yang memiliki Luas Wilayah 99,33 Km² Kota yang merupakan kawasan Pelabuhan dan jasa, dapat dilihat dari aktifitas keseharian masyarakatnya yang bergerak di bidang Bisnis, Perdagangan dan jasa. Kota Parepare yang terdiri dari 4 kecamatan dan 22 kelurahan yang secara administrasi memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:³

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru, dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

Menurut UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Kota adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Kota merupakan Pusat dari Segala Aktifitas masyarakat, baik dari Sosial maupun Ekonomi, Pusat Pemerintahan, Pendidikan, Perdagangan, Perindustrian dan lain-lain.

METODE PENELITIAN

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti literatur, laporan riset, atau publikasi industri. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yang diperoleh dari tinjauan literatur yang dapat dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan tren, tantangan, dan strategi adaptasi yang diidentifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

A. Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Parepare

Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki peran penting dalam mendukung keseimbangan ekosistem, meningkatkan kualitas lingkungan, dan menjadi ruang interaksi sosial masyarakat. Sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kawasan perkotaan diwajibkan memiliki RTH minimal 30% dari total luas lahan. Hal ini menjadi dasar perencanaan Kota Parepare yang telah menetapkan target RTH seluas 2.981,344 hektar atau 31,54% dari total wilayahnya. Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan berkelanjutan. RTH di Parepare dirancang dengan berbagai fungsi yang mencakup aspek ekologis, ekonomis, edukasi, dan estetis. Dari sisi ekologis, RTH berperan sebagai penyeimbang ekosistem, konservasi keanekaragaman hayati, dan pencipta iklim mikro yang mendukung kehidupan. Fungsi ekonomisnya terlihat dari keberadaan sarana rekreasi, olahraga, hingga ruang pelayanan publik yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai ruang edukasi, RTH juga menjadi lokasi strategis untuk pembibitan

tanaman dan kegiatan penelitian lingkungan. Secara estetis, RTH mampu mempercantik lanskap kota dan memberikan kenyamanan visual bagi penduduk maupun pengunjung.

Meskipun memiliki potensi besar, implementasi RTH di Parepare menghadapi berbagai kendala. Luas wilayah kota yang hanya 99,93 km² dengan tingkat kepadatan penduduk yang terus meningkat menjadi tantangan utama. Sejak 2018, kepadatan penduduk Parepare meningkat rata-rata 1,19% per tahun, yang beriringan dengan lonjakan jumlah kendaraan bermotor. Hal ini tidak hanya menambah beban ruang kota tetapi juga meningkatkan polusi udara dan suhu lingkungan, terutama di musim kemarau. Selain tekanan dari pertumbuhan populasi, kebutuhan lahan untuk RTH juga menjadi prioritas mendesak dalam mitigasi risiko bencana alam. Kota Parepare sering menghadapi masalah banjir, erosi, dan tanah longsor akibat minimnya daerah resapan air. RTH, sebagai solusi alami, berperan penting dalam mengendalikan aliran air hujan dan mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas. Namun, keterbatasan lahan kosong memperumit proses pengembangan.

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya RTH juga menjadi tantangan besar. Partisipasi publik dan sektor swasta dalam penghijauan kota masih rendah, sementara pengawasan terhadap pelanggaran tata ruang kurang optimal. Banyak lahan yang seharusnya difungsikan sebagai RTH digunakan untuk keperluan komersial atau hunian tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Strategi inovatif diperlukan untuk mengatasi kendala ini. Salah satu pendekatan adalah mendorong penghijauan vertikal melalui taman atap dan dinding hijau pada bangunan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga harus diperkuat untuk meningkatkan partisipasi aktif dalam perencanaan dan pengelolaan RTH. Dengan demikian, ruang hijau tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga seluruh elemen masyarakat.

Selain itu, revisi perencanaan tata ruang diperlukan agar data baseline mengenai RTH lebih mencerminkan kondisi aktual di lapangan. Hal ini penting untuk menentukan langkah-langkah strategis yang lebih realistis dan efektif. Regulasi yang lebih ketat, disertai pengawasan yang konsisten, harus diterapkan untuk memastikan keberlanjutan RTH sebagai bagian integral dari tata ruang kota. Keberadaan RTH di Parepare memiliki dampak luas bagi kesehatan masyarakat. Polusi udara yang berkurang dan suhu kota yang lebih sejuk akan meningkatkan kualitas hidup. Selain itu, RTH menyediakan ruang untuk aktivitas sosial dan rekreasi yang dapat mendukung kesejahteraan psikologis penduduk. Dalam jangka panjang, manfaat ini tidak hanya dirasakan oleh generasi sekarang tetapi juga bagi masa depan kota Parepare.

Kebijakan RTH juga berkontribusi pada upaya global dalam mitigasi perubahan iklim. Dengan memperluas ruang hijau, Parepare dapat berperan dalam mengurangi emisi karbon dan meningkatkan kapasitas penyerapan CO₂. Upaya ini sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam. Dengan strategi yang tepat dan komitmen semua pihak, Kota Parepare memiliki peluang besar untuk mewujudkan target RTH nasional. Keberhasilan ini tidak hanya menciptakan kota yang lebih layak huni tetapi juga memberikan contoh bagaimana pengelolaan ruang terbuka hijau dapat menjadi model pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

B. Implementasi Kebijakan RTH

Fluktuasi persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Parepare mencerminkan dinamika dan tantangan dalam pengelolaan tata ruang hijau perkotaan. Berdasarkan data yang tersedia, pada tahun 2014, baseline RTH tercatat sebesar 17,40%. Angka ini menunjukkan upaya awal yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam memenuhi target proporsi ruang hijau. Dalam beberapa tahun berikutnya, berbagai intervensi dilakukan, sehingga pada 2017 terjadi peningkatan signifikan dengan persentase RTH mencapai 18,50%. Capaian ini mencerminkan efektivitas strategi yang diterapkan dengan kinerja yang tercatat sebesar 94,87%.

Namun, pada tahun 2018, terjadi penurunan drastis persentase RTH menjadi hanya 12,58%, dengan capaian kinerja yang menurun hingga 62,90%. Penurunan ini diidentifikasi sebagai akibat dari kesalahan dalam menetapkan baseline data awal, yang menyebabkan ketidaksesuaian antara target dan kondisi lapangan. Masalah ini menyoroti pentingnya akurasi data dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan, terutama untuk memastikan keberlanjutan program RTH. Fluktuasi ini juga mencerminkan tantangan sistemik dalam tata kelola RTH, termasuk keterbatasan sumber daya, pengawasan yang lemah, dan kompleksitas dalam penyesuaian tata ruang di wilayah perkotaan yang terus berkembang. Untuk mengatasi masalah ini, revisi data baseline, penguatan sistem monitoring, serta

kolaborasi lintas sektor menjadi langkah yang sangat penting guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas kebijakan RTH di masa depan.

C. Dampak dan Keberlanjutan Kebijakan RTH

Ruang terbuka hijau (RTH) memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Bagi Parepare, pengembangan RTH yang optimal dapat memberikan berbagai manfaat signifikan, baik untuk lingkungan, kesehatan masyarakat, hingga kualitas hidup secara keseluruhan. Salah satu manfaat utama dari RTH adalah kemampuannya dalam mengurangi polusi udara dan menurunkan suhu kota. Kehadiran pepohonan dan vegetasi di RTH dapat menyerap gas berbahaya seperti karbon dioksida, mengurangi debu dan polutan lainnya, serta meningkatkan kualitas udara di kawasan sekitar. Selain itu, tanaman yang ada di RTH juga berfungsi sebagai penyejuk alami, mengurangi efek panas urban yang seringkali terjadi di kota-kota besar.

Dengan berkurangnya polusi udara dan suhu kota yang lebih terkendali, kesehatan masyarakat akan jauh lebih terjamin. Udara yang lebih bersih akan mengurangi risiko penyakit pernapasan, seperti asma dan bronkitis, yang seringkali dipicu oleh polusi udara. Masyarakat akan merasakan dampak positif dari kualitas udara yang lebih baik, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup mereka. Di samping itu, RTH juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk berolahraga, seperti berjalan kaki, berlari, atau bersepeda, yang dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental masyarakat secara keseluruhan.

Selain manfaat kesehatan, RTH juga menyediakan ruang untuk rekreasi dan interaksi sosial. Dengan adanya taman-taman dan ruang terbuka yang hijau, masyarakat dapat berkumpul, berinteraksi, dan membangun rasa kebersamaan. Hal ini sangat penting dalam mempererat hubungan sosial di lingkungan perkotaan. Ruang terbuka hijau memberikan tempat bagi anak-anak untuk bermain, keluarga untuk berlibur, dan warga kota untuk bersantai setelah rutinitas sehari-hari. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas kehidupan sosial, tetapi juga menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap lingkungan.

RTH yang terencana dengan baik juga berperan penting dalam mitigasi risiko bencana alam, seperti banjir dan erosi. Tanaman yang ada di RTH memiliki kemampuan untuk menyerap air hujan, sehingga dapat mengurangi volume air yang mengalir ke saluran air dan mengurangi risiko banjir. Selain itu, akar tanaman juga berfungsi untuk menahan tanah, mencegah terjadinya erosi, terutama di daerah-daerah yang rawan longsor atau erosi. Pengelolaan RTH yang tepat dapat memperkuat daya dukung lingkungan dan mengurangi kerugian akibat bencana alam.

Pembangunan RTH yang optimal juga dapat mendukung keberlanjutan kota Parepare. Dengan semakin berkembangnya urbanisasi dan bertambahnya jumlah penduduk, penting untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan kota dan kelestarian lingkungan. RTH dapat menjadi solusi untuk mengurangi tekanan terhadap lingkungan, menciptakan ekosistem kota yang lebih sehat, dan memberikan tempat bagi flora dan fauna untuk berkembang. Keberadaan RTH yang luas dan beragam juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, yang dapat meningkatkan perekonomian lokal.

Dalam konteks perubahan iklim, RTH juga memainkan peran yang sangat penting. Dengan mengurangi efek panas urban, RTH dapat membantu kota Parepare beradaptasi dengan suhu yang lebih ekstrem. Selain itu, dengan meningkatkan jumlah pohon dan vegetasi, RTH dapat menyerap lebih banyak karbon dioksida, yang membantu mengurangi dampak pemanasan global. Hal ini menjadikan pengembangan RTH sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim yang lebih luas, sekaligus memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang.

Pengembangan RTH juga dapat meningkatkan nilai estetika kota. Taman-taman yang terawat dengan baik, ruang terbuka hijau yang asri, dan area publik yang ramah lingkungan akan mempercantik pemandangan kota Parepare. Keindahan ini tidak hanya memberikan kenyamanan bagi warga kota, tetapi juga menciptakan citra positif bagi kota Parepare di mata dunia luar. Kota yang memiliki banyak ruang terbuka hijau biasanya dianggap lebih ramah lingkungan dan lebih nyaman untuk dihuni.

Namun, untuk mencapai manfaat-manfaat tersebut, pengelolaan dan perencanaan RTH di Parepare harus dilakukan secara cermat dan berkelanjutan. Pemerintah kota perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, organisasi lingkungan, dan sektor swasta, untuk merancang dan mengelola RTH yang efektif. Dalam perencanaan ini, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebutuhan ruang, ketersediaan lahan, serta jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi iklim dan tanah di Parepare. Selain itu, perlu

ada regulasi yang mendukung pengembangan dan perlindungan RTH, agar manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Keberhasilan pengembangan RTH juga sangat bergantung pada kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengelolaan RTH, agar mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap keberlanjutan ruang terbuka hijau yang ada. Melalui edukasi dan kampanye, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya RTH dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam merawatnya. Misalnya, masyarakat dapat dilibatkan dalam kegiatan penghijauan atau dalam merawat taman-taman kota yang ada.

Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin terhadap kondisi RTH yang ada. Pemeliharaan yang berkala dan perbaikan terhadap fasilitas yang ada di ruang terbuka hijau sangat penting untuk memastikan bahwa RTH tetap terjaga fungsinya. Taman-taman yang tidak terawat atau tidak ada pemeliharaan dapat menurunkan kualitas lingkungan dan tidak memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Investasi dalam RTH juga dapat memberikan dampak ekonomi yang positif bagi Parepare. Dengan meningkatkan kualitas lingkungan, RTH dapat menarik lebih banyak pengunjung dan wisatawan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata. Selain itu, kawasan dengan banyak ruang terbuka hijau cenderung memiliki nilai properti yang lebih tinggi, memberikan keuntungan bagi pemilik lahan dan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak.

RTH juga memiliki dampak positif terhadap ketahanan sosial dan ekonomi kota Parepare. Ketika masyarakat memiliki akses yang lebih baik ke ruang terbuka hijau, mereka dapat lebih mudah mengakses berbagai layanan dan fasilitas yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. RTH dapat menjadi tempat untuk berbagai aktivitas komunitas, seperti pasar rakyat, kegiatan seni, atau pertemuan sosial, yang mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih inklusif.

Dengan memperhatikan semua aspek tersebut, pengembangan RTH di Parepare bukan hanya memberikan keuntungan ekologis, tetapi juga sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, RTH harus dianggap sebagai investasi jangka panjang yang mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan. Pemerintah dan masyarakat perlu berkomitmen untuk menjaga dan mengembangkan RTH agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi yang akan datang.

Selain itu, penting juga untuk memperhatikan keberagaman dalam jenis ruang terbuka hijau. RTH tidak hanya terbatas pada taman kota, tetapi juga mencakup area pertanian urban, kebun komunitas, dan bahkan koridor hijau yang dapat menghubungkan berbagai kawasan di kota. Dengan memperluas konsep RTH, Parepare dapat menciptakan jaringan ruang terbuka hijau yang saling terhubung, memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua lapisan masyarakat.

Pada akhirnya, RTH yang optimal di Parepare akan memberikan dampak positif yang besar bagi lingkungan, kesehatan, ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat. Pengembangan ruang terbuka hijau harus menjadi prioritas dalam perencanaan kota, karena manfaat yang dihasilkan sangatlah luas dan berkelanjutan. Melalui perencanaan yang baik, partisipasi masyarakat yang aktif, dan pengelolaan yang berkelanjutan, Parepare dapat menjadi kota yang lebih hijau, sehat, dan berkelanjutan untuk masa depan.

Pembahasan

A. Tantangan Pengelolaan RTH

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kota Parepare menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi kebijakan tersebut. Beberapa tantangan utama dalam pengelolaan RTH meliputi:

1. **Kesalahan Perencanaan Awal:** Salah satu tantangan utama yang seringkali dihadapi dalam implementasi kebijakan RTH adalah kesalahan dalam perencanaan awal. Dalam banyak kasus, data dasar (baseline data) yang digunakan untuk merencanakan pengembangan RTH tidak mencerminkan kondisi eksisting di lapangan. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menentukan lokasi yang tepat, jenis tanaman yang sesuai, serta ukuran dan fungsi ruang terbuka hijau yang diperlukan. Kesalahan dalam perencanaan ini juga dapat mengarah pada pemborosan sumber daya, karena lahan yang dipilih tidak optimal atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. **Keterbatasan Lahan:** Di kota-kota dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan RTH adalah keterbatasan lahan. Parepare, sebagai salah satu kota yang berkembang pesat, menghadapi tekanan tinggi terhadap penggunaan lahan untuk pembangunan infrastruktur, perumahan, dan kawasan

komersial. Minimnya lahan kosong membuat pengembangan RTH menjadi lebih sulit, terutama di pusat kota yang sudah penuh sesak. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam pemanfaatan lahan yang ada, seperti melalui konsep taman vertikal, pemanfaatan lahan kosong di area publik, atau transformasi lahan yang tidak produktif menjadi ruang terbuka hijau.

3. **Kesadaran Publik yang Rendah:** Tantangan lain yang signifikan adalah rendahnya kesadaran publik mengenai pentingnya RTH. Masyarakat seringkali kurang memahami manfaat jangka panjang dari keberadaan ruang terbuka hijau, baik untuk lingkungan, kesehatan, maupun kualitas hidup secara umum. Minimnya partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam kegiatan penghijauan juga menjadi kendala. Program penghijauan seringkali tidak mendapat dukungan yang cukup dari masyarakat, yang berakibat pada rendahnya keberhasilan implementasi RTH. Oleh karena itu, diperlukan kampanye edukasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH, baik melalui kegiatan penghijauan maupun dalam menjaga kebersihan dan kelestarian ruang terbuka hijau.
4. **Pengawasan Lemah:** Pengawasan terhadap implementasi kebijakan RTH juga menjadi tantangan yang signifikan. Kurangnya monitoring yang efektif terhadap penggunaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran, seperti alih fungsi lahan RTH menjadi kawasan komersial atau permukiman. Selain itu, penegakan hukum yang lemah terhadap pelanggaran kebijakan juga berkontribusi pada ketidakberhasilan pengelolaan RTH. Tanpa adanya pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas, kebijakan RTH akan sulit untuk dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, penguatan pengawasan dan penegakan hukum sangat penting untuk menjaga keberlanjutan dan efektivitas kebijakan RTH di Parepare.

B. Strategi Optimalisasi RTH

Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan memastikan bahwa kebijakan ini dapat diterapkan dengan sukses, diperlukan strategi-strategi inovatif yang melibatkan berbagai pihak. Beberapa strategi yang dapat diimplementasikan untuk optimalisasi RTH di Kota Parepare antara lain:

1. **Kolaborasi dengan Masyarakat dan Swasta:** Salah satu strategi penting dalam mengelola dan memelihara RTH adalah membangun kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, pemeliharaan, dan pengawasan RTH. Melalui program penghijauan komunitas dan kegiatan yang melibatkan warga, kesadaran masyarakat tentang pentingnya RTH dapat ditingkatkan. Selain itu, sektor swasta juga dapat berperan dalam pengelolaan RTH, baik dalam bentuk sponsor, sumbangan tanaman, atau pembangunan taman publik. Kolaborasi ini tidak hanya mengurangi beban anggaran pemerintah, tetapi juga meningkatkan partisipasi aktif dalam menjaga kelestarian ruang terbuka hijau.
2. **Pemanfaatan Lahan Vertikal:** Mengingat keterbatasan lahan yang ada di Parepare, pemanfaatan lahan vertikal menjadi salah satu solusi inovatif. Mendorong penghijauan pada atap dan dinding bangunan, baik di area perumahan, perkantoran, maupun bangunan komersial, dapat memperluas ruang hijau tanpa membutuhkan lahan baru yang luas. Konsep taman vertikal atau green roofs dapat memberikan manfaat ganda, yaitu menciptakan ruang terbuka hijau yang baru dan mengurangi suhu panas di sekitar bangunan. Ini akan mengurangi efek panas urban sekaligus meningkatkan kualitas udara di lingkungan sekitarnya.
3. **Revisi Perencanaan:** Untuk memastikan keberhasilan pengembangan RTH, perlu dilakukan revisi terhadap perencanaan yang ada. Salah satu langkah penting adalah memperbaiki data baseline agar mencerminkan kondisi aktual di lapangan. Pemerintah harus melakukan survei yang mendalam dan menyeluruh untuk memperoleh data yang akurat tentang ketersediaan lahan, kepadatan penduduk, kondisi lingkungan, dan kebutuhan ruang terbuka hijau di berbagai kawasan kota. Dengan data yang lebih akurat, perencanaan RTH dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil, memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tepat sasaran dan efektif dalam menciptakan ruang hijau yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
4. **Penguatan Regulasi:** Penguatan regulasi terkait dengan pengelolaan RTH sangat penting untuk menjaga keberlanjutan kebijakan ini. Pemerintah perlu memastikan bahwa implementasi kebijakan RTH dilakukan secara konsisten dan diawasi dengan ketat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengeluarkan peraturan yang jelas mengenai penggunaan dan perlindungan RTH, serta memberikan sanksi tegas bagi pihak-pihak yang melanggar aturan, seperti alih fungsi lahan RTH menjadi area komersial atau permukiman. Selain itu,

pengawasan yang rutin dan penegakan hukum yang efektif akan menciptakan efek jera dan memastikan bahwa ruang terbuka hijau tetap terjaga fungsinya untuk kepentingan masyarakat. Keberhasilan kebijakan RTH di Parepare sangat bergantung pada komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini secara efektif, Kota Parepare tidak hanya dapat memenuhi target proporsi RTH nasional, tetapi juga menciptakan lingkungan kota yang lebih layak huni, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Pembangunan ruang terbuka hijau yang optimal akan memberikan manfaat yang signifikan bagi kesehatan masyarakat, mitigasi bencana, dan keberlanjutan kota, sehingga Parepare dapat menjadi kota yang lebih hijau dan nyaman untuk dihuni di masa depan.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Parepare belum berjalan secara maksimal. Dalam implementasinya, kebijakan pengelolaan RTH di Kota Parepare menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasinya. Salah satu indikatornya adalah persentase RTH di Kota Parepare yang belum memenuhi ketentuan minimal 30% dari luas kawasan perkotaan. Saat ini, RTH Kota Parepare baru mencapai 15,57% dari total luas wilayah kota. Hal ini disebabkan oleh kurangnya konsistensi pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan ini, terutama dalam hal pembangunan RTH yang belum sesuai dengan standar komponen yang telah ditetapkan.

Pemerintah masih perlu melakukan perbaikan dalam berbagai aspek, seperti penataan dan pengelolaan lahan yang lebih efisien serta pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa pembangunan RTH sesuai dengan rencana dan dapat memberi manfaat optimal bagi masyarakat. Ketidaksesuaian ini juga mencerminkan perlunya evaluasi terhadap kebijakan yang ada, agar pengelolaan RTH dapat memberikan dampak yang lebih signifikan, baik dalam aspek ekologis, sosial, maupun kesehatan masyarakat.

Selain itu, perkembangan teknologi juga memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk di bidang akuntansi. Di tengah kemajuan teknologi, para akuntan diharapkan dapat bekerja dengan solusi Teknologi Informasi (TI) yang berkembang pesat. Salah satu inovasi yang muncul adalah audit jarak jauh, yang mengacu pada penggunaan teknologi dalam mengumpulkan informasi, mewawancarai auditee, serta melaksanakan prosedur audit lainnya, terutama ketika metode tatap muka tidak memungkinkan. Teknologi ini mempermudah dan mempercepat proses audit, serta meningkatkan efisiensi.

Selain itu, Big Data juga memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat. Dengan menggunakan keterampilan dan alat analitis yang dimiliki, Big Data dapat mengurangi waktu pelaporan dan memberikan wawasan yang lebih mendalam dalam proses pengambilan keputusan. Dampak Big Data tidak hanya terasa di bidang akuntansi keuangan dan administrasi, tetapi juga dalam audit, yang berkontribusi pada penyediaan informasi yang lebih andal dan akurat untuk mendukung keberlanjutan operasional serta kebijakan yang lebih efektif.

B. Saran

Bagi pengembangan kompetensi auditor sangat penting dengan mengikuti pelatihan yang berfokus pada penggunaan teknologi baru seperti perangkat lunak audit berbasis AI dan alat analisis data besar (big data). Auditor juga perlu memahami sistem informasi dengan lebih mendalam untuk mengidentifikasi risiko dan peluang yang mungkin tidak terlihat dengan metode audit tradisional. Kompetensi dalam bidang ini akan memungkinkan auditor untuk menjalankan tugas dengan lebih efisien dan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi organisasi.

Kedepannya, penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif, seperti survei atau analisis statistik, untuk memberikan bukti yang lebih solid mengenai efisiensi, akurasi, dan efektivitas audit digital. Data empiris tersebut, akan memberikan bukti nyata tentang bagaimana digitalisasi dapat meningkatkan kualitas audit dan mendorong adopsi teknologi baru dalam proses audit.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksoy, T., & Gurol, B. (2018). Artificial Intelligence in Computer-Aided Auditing Techniques and Technologies (CAATs) and an Application Proposal for Auditors.
- Barros, C., & Marques, R. P. (2022). Continuous Assurance for the Digital Transformation of Internal Auditing, 7(1). <https://doi.org/10.55267/iadt.07.11681>
- Farhan, K. A., & Kawther, B. I. (2023). Accounting Audit Profession in Digital Transformation Environment Between Theoretical Framework and Practical Reality, 22(May).
- Ismanidar, N., Maksum, A., Gultom, P., & Meutia, R. (2022). The Effect of Auditor Competence and Remote Audit Support on Audit Quality Through Digital-Based Governance with Information Technology as Moderating Variable in State Financial Audit, 4(2). <https://doi.org/10.55057/ijbtm.2022.4.2.2>
- Kljaji, M., Vule, M., & Hadrović-Zekić, B. (2022). Internal Audit in the COVID-19 Environment: Key Aspects and Perspectives of Remote Auditing, 19(1). <https://doi.org/10.5937/ejae19-35881>
- Mijwil, M. M., Filali, Y., Aljanabi, M., Bounabi, M., & Al-Shahwani, H. (2023). The Purpose of Cybersecurity Governance in the Digital Transformation of Public Services and Protecting the Digital Environment, 2023. <https://doi.org/10.58496/mjcs/2023/001>
- Radwan, H., Zeidan, A., & Elbasuony, H. (2021). The Impact of Digital Transformation on Internal Audit, 2. <https://doi.org/10.21608/ihites.2021.20400>
- Serag, A. A. E., & Daoud, M. M. (2021). Remote Auditing: An Alternative Approach to Face the Internal Audit Challenges During the COVID-19 Pandemic, 522–552. <https://doi.org/10.21608/atasu.2021.181073>
- Tharouma, S., & Oudia, M. (2022). A Review of the Literature on Internal Audit in the Era of Digital Transformation, 6(4), 215–225.
- Yigitbasioglu, O., Green, P., & Cheung, D. (2023). Digital Transformation and Accountants as Advisors, 0–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/aaaj-02-2019-389>